

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat perbedaan kredit macet di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pasca terjadinya gempa bumi tektonik tanggal 27 MEI 2006 dan dampak peraturan Bank Indonesia nomor 8/10/PBI/2006 terhadap penanganan kredit macet pasca terjadinya gempa bumi kuartal I tahun 2006 sampai dengan kuartal II tahun 2009. Sampel dalam penelitian ini adalah semua Bank Umum dan BPR yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* dan *cross section* dalam bentuk data kuartal. Teknik analisis yang digunakan adalah uji beda Wilcoxon-Test untuk melihat sejauh mana perbedaan tingkat kredit macet di DIY pasca terjadinya gempa bumi dan teknik uji deskriptif untuk menguji dampak peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kredit macet perbankan sebelum dan sesudah terjadinya gempa bumi tektonik tanggal 27 Mei 2006, dimana pada hasil analisis ditemukan bahwa sebagian besar perbankan di DIY mengalami peningkatan kredit macet dengan tingkat signifikansi perbedaan sebesar 0,012 yaitu Bank Umum Kota Yogyakarta dan BPR Kota Yogyakarta, Bank Umum Sleman dan BPR Sleman, Bank Umum Gunung Kidul dan BPR Gunung Kidul dan BPR Bantul. Sementara itu, dua bank lainnya yaitu Bank Umum Kulon Progo dan BPR Kulon Progo memiliki jumlah kredit macet yang sama antara sebelum dan sesudah gempa bumi. Sedangkan dari hasil uji dampak terhadap PBI Nomor 8/10/PBI/2006 dapat disimpulkan bahwa peraturan yang berlaku selama tiga tahun tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup signifikan atau kurang berdampak terhadap penurunan kredit macet perbankan di DIY, yaitu dilihat dari rasio NPL bank yang masih relatif tidak konstan dan cenderung masih tinggi diatas 5% khususnya pada BPR disetiap kabupaten dan kota.

Kata kunci: Kredit Macet, Dampak, Penanganan Kredit Macet dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006.

ABSTRACT

The purpose of this research are analysing and to know the level of Non-Performing Loan in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) after tectonic earthquake on May, 27th 2006 and the effects of Bank Indonesia regulation No. 8/10/PBI/2006 on the handling of Non-Performing Loan after earthquake Quarter I in 2006 until Quarter II in 2009. Moreover, the samples of this research are all of commercial Bank and BPR that operated in DIY. Furthermore, this research used secondary data such as *time series and cross section* data in the form of quarter data. Tecnic analysing in using different wilcoxon-Test to see the differences level of Non-Performing Loan in DIY after earthquake and also this paper used descriptive to check the effects of Bank Indonesia regulation No. 8/10/PBI/2006.

The result of this paper showed that there are differences in the level of Non-Performing Loan before and after earthquake tectonic in May, 27th 2006. The result of analysis was found that most of Bank in DIY hs increased Non-Performing Loan with a significance level of 0,012, they are Commercial Bank and BPR Yogyakarta city, Commercial Bank and BPR Sleman, Commercial Bank and BPR Gunung Kidul and BPR Bantul. Meanwhile, two other banks are commercial banks and BPR Kulon Progo has the same number in Non-Performing Loan between before and after the earthquake. The last is results of testing the effects on the PBI No. 8/10/PBI/2006, it's concluded that the regulation for three years didn't have significant effect and it's more less efective for reducing on Non-Performing Loan at Bank in DIY. Then it's be seen from the Bank NPL ration they are still relatif, didn't constant, and tends to be higher than 5 percent especially at BPR in each city and country.

Keywords: *Non-performing loan, Effects, Handling of Non-performing Loan and Bank Indonesia Regulation No. 8/10/PBI/2006.*